

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Landasan Teori**

Landasan teori dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar konseptual untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Teori-teori yang digunakan meliputi teori akuntabilitas publik, teori sistem informasi, serta teori pengendalian internal yang relevan dengan konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya landasan teori ini, diharapkan penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat dalam menjelaskan fenomena yang terjadi.

##### **2.1.1 Teori Akuntansi Publik**

Teori akuntansi publik menjadi dasar utama dalam menjelaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Teori ini menekankan bahwa setiap penggunaan sumber daya publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

Teori akuntabilitas publik juga menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan dapat dipercaya.

Dalam konteks pemerintah daerah, laporan keuangan yang berkualitas menjadi indikator utama dalam menilai tingkat akuntabilitas. Semakin baik kualitas laporan keuangan, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas pemerintah daerah.

##### **2.1.2 Teori Sistem Informasi**

Teori sistem informasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana peran sistem dalam mendukung pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat. Dalam konteks penelitian ini, teori sistem informasi menjadi landasan dalam

memahami bagaimana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Teori sistem informasi juga menjelaskan bahwa sistem informasi berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan. Romney dan Steinbart (2018) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan andal.

Dalam penelitian ini, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berperan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui integrasi data dan proses pelaporan yang lebih efisien.

### **2.1.3 Teori Pengendalian Internal (COSO)**

Teori pengendalian internal menjelaskan pentingnya sistem pengawasan dalam menjaga keandalan laporan keuangan serta mencegah kesalahan dan kecurangan. Dalam penelitian ini, teori COSO digunakan sebagai dasar untuk memahami komponen-komponen pengendalian internal dalam organisasi sektor publik.

Sistem pengendalian internal terdiri dari lima komponen utama, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Pengendalian internal yang baik mampu menjamin keandalan laporan keuangan serta mencegah kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

## **2.2 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan variabel penelitian, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan Kualitas

Laporan Keuangan. Pembahasan ini dilakukan secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif sebagai dasar dalam penyusunan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### **2.2.1 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi. Dalam penelitian ini, SIPD dipandang sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan melalui peningkatan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan data keuangan.

#### **2.2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk mengelola data perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah (Permendagri No. 70 Tahun 2019). Indikator SIPD meliputi efektivitas, efisiensi, akurasi, aksesibilitas, dan transparansi.

Menurut Katili, Blongkod, & Pakaya (2025) dalam penelitian di Gorontalo, SIPD merupakan instrumen penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, Florencia & Saleh (2023) di Cimahi menjelaskan bahwa SIPD dipahami sebagai sistem elektronik yang memfasilitasi keterpaduan data antar perangkat daerah untuk mempercepat proses pelaporan keuangan.

Romney dan Steinbart (2018) mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai sistem yang mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks pemerintah daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berfungsi sebagai alat utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.

#### **2.2.1.2 Tujuan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

Tujuan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat

dirumuskan dari aspek regulasi maupun teori sistem informasi. Berdasarkan Sudiartini (2022), terdapat enam tujuan utama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yaitu:

1. Menyediakan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
2. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
3. Mendukung akuntabilitas publik melalui standar pelaporan yang seragam.
4. Menyederhanakan proses administrasi dan mengurangi redundansi data.
5. Menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah melalui sistem informasi yang terintegrasi.
6. Mengurangi potensi penyimpangan, kecurangan, dan *fraud* dalam pengelolaan anggaran.

#### **2.2.1.3 Klasifikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terbagi dalam beberapa modul utama sesuai dengan fungsinya. Permendagri 70/2019 dan penelitian Nafisah (2023) menyebut klasifikasi modul Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai berikut:

1. SIPD Perencanaan, untuk mengelola dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD).
2. SIPD Penganggaran, untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta APBD.
3. SIPD Keuangan, untuk mencatat transaksi keuangan, penatausahaan, dan akuntansi.
4. SIPD Pembangunan, untuk memantau realisasi program pembangunan.
5. SIPD Profil Daerah, sebagai basis data profil daerah.

#### **2.2.1.4 Komponen Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

Menurut Katili et al. (2025), komponen utama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terdiri dari:

1. Input data: data keuangan dan pembangunan dari OPD.

2. Proses: pengolahan data melalui sistem berbasis aplikasi.
3. Output: laporan keuangan dan laporan pembangunan.
4. Pengguna: pemerintah pusat, daerah, DPRD, auditor, dan masyarakat.

#### **2.2.1.5 Manfaat Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

Manfaat utama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menurut Mariana dan Pandoyo (2024) adalah:

1. Menjamin konsistensi dan keseragaman data antar daerah.
2. Mempercepat penyusunan laporan keuangan.
3. Mempermudah pemeriksaan oleh BPK.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.
5. Mengurangi kesalahan pencatatan manual.

#### **2.2.1.6 Indikator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat diukur dengan indikator berikut (Mariana & Pandoyo, 2024):

1. Efektivitas, SIPD mampu membantu pencapaian tujuan pengelolaan keuangan.
2. Efisiensi, SIPD dapat menghemat waktu dan biaya administrasi.
3. Akurasi, laporan yang dihasilkan terbebas dari kesalahan material.
4. Aksesibilitas, kemudahan pengguna dalam mengakses data.
5. Transparansi, keterbukaan informasi keuangan kepada publik.

#### **2.2.2 Sistem Pengendalian Internal (SPI)**

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini, SPI menjadi faktor penting yang diduga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

##### **2.2.2.1 Pengertian Pengendalian Internal (SPI)**

Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang dilakukan secara

berkesinambungan oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi (PP No. 60 Tahun 2008). Indikator SPI meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Menurut Mulia (2019), Pengendalian Internal (SPI) dalam sektor publik merupakan serangkaian prosedur yang dirancang untuk menjamin bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, kegiatan operasional berjalan efektif dan efisien, serta kepatuhan terhadap regulasi tetap terjaga.

Mulyadi (2016) menjelaskan bahwa Pengendalian Internal (SPI) mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi dan menjamin keandalan data akuntansi. Contohnya, pemisahan fungsi pencatatan dan pemeriksaan merupakan bagian dari pengendalian internal.

#### **2.2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal (SPI)**

Tujuan utama Pengendalian Internal (SPI) adalah memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi. Areai (2024) dan Pakpahan, Nasution, & Lumbantobing (2022) menguraikan tujuan Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebagai berikut:

1. Efektivitas dan efisiensi operasi: memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional pemerintah berjalan sesuai target dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
2. Keandalan laporan keuangan: menjamin laporan keuangan yang disajikan bebas dari salah saji material dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
3. Kepatuhan terhadap regulasi: memastikan semua kegiatan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perlindungan aset: mengamankan aset organisasi dari kehilangan, penyalahgunaan, atau kerusakan.
5. Pencegahan dan deteksi fraud: meminimalisir peluang terjadinya kecurangan, baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal organisasi.

### **2.2.2.3 Klasifikasi Pengendalian Internal (SPI)**

Menurut PP No. 60 Tahun 2008, Pengendalian Internal (SPI) dalam pemerintahan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar:

1. SPI Preventif (pencegahan)

SPI jenis ini bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan sebelum terjadi, misalnya melalui kebijakan otorisasi transaksi, pembatasan akses data, dan rotasi jabatan.

2. SPI Detektif (pendeteksian)

SPI jenis ini berfungsi mendeteksi dan mengoreksi kesalahan atau penyimpangan yang telah terjadi, seperti audit internal, rekonsiliasi data, dan pemeriksaan rutin.

Klasifikasi lain dikemukakan oleh COSO (2013) yang membagi Sistem Pengendalian Internal (SPI) berdasarkan tingkat tanggung jawab, yaitu:

1. Pengendalian Manajerial, dilakukan oleh pimpinan organisasi untuk memastikan arah kebijakan berjalan sesuai rencana.
2. Pengendalian Operasional, dilakukan oleh unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Pengendalian Akuntansi, dilakukan untuk menjamin keandalan laporan keuangan melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang andal.

### **2.2.2.4 Indikator Pengendalian Internal (SPI)**

Indikator Pengendalian Internal (SPI) dalam PP No. 60 Tahun 2008 meliputi lima unsur utama:

1. Efektivitas lingkungan pengendalian: sejauh mana pimpinan berkomitmen terhadap integritas dan nilai etika organisasi.
2. Kualitas penilaian risiko: kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang memengaruhi laporan keuangan.
3. Konsistensi aktivitas pengendalian: penerapan kebijakan dan prosedur secara menyeluruh di semua unit kerja.

4. Efisiensi komunikasi dan informasi: ketersediaan data yang cepat, tepat, dan dapat diandalkan.
5. Kualitas pemantauan dan tindak lanjut audit: sejauh mana rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat dilaksanakan dengan baik.

#### **2.2.2.5 Manfaat Pengendalian Internal (SPI)**

Menurut Mardiasmo (2018), manfaat Pengendalian Internal (SPI) dalam sektor publik meliputi:

1. Meningkatkan keandalan laporan keuangan melalui mekanisme kontrol yang memastikan data keuangan bebas dari kesalahan material.
2. Menjaga aset organisasi, baik kas, inventaris, maupun aset tetap agar tidak disalahgunakan.
3. Meningkatkan efisiensi operasional, karena proses kerja lebih terarah dan sesuai standar.
4. Menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
5. Mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui sistem pengawasan berlapis.

#### **2.2.3 Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas laporan keuangan merupakan indikator utama dalam menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, kualitas laporan keuangan dijadikan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh penerapan SIPD dan SPI.

##### **2.2.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas laporan keuangan adalah kemampuan laporan keuangan dalam menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami, dan tepat waktu sesuai SAP (PP No. 71 Tahun 2010).

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa laporan keuangan sektor publik yang berkualitas merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas

pengelolaan sumber daya publik secara transparan dan akuntabel. Mahmudi (2016) menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan menjadi prasyarat utama terciptanya akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Halim dan Kusufi (2020) menyatakan bahwa rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sering kali ditandai dengan keterlambatan penyampaian laporan, lemahnya pengungkapan informasi, serta masih ditemukannya salah saji pencatatan akun. Temuan ini sejalan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih menemukan berbagai permasalahan kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah di Indonesia.

### **2.2.3.2 Tujuan Kualitas Laporan Keuangan**

Tujuan kualitas laporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban publik. Menurut Sinurat (2018), tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. tujuan kualitas laporan keuangan meliputi:

1. Transparansi, menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan dapat diakses publik.
2. Akuntabilitas, menunjukkan pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan dana publik.
3. Dasar pengambilan keputusan, mendukung perencanaan anggaran, kebijakan pembangunan, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah.
4. Pengawasan dan evaluasi, mendukung fungsi pengawasan oleh DPRD, BPK, Inspektorat Daerah, maupun masyarakat.
5. Kepatuhan terhadap regulasi, menjamin pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **2.2.3.3 Klasifikasi Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas laporan keuangan dapat diklasifikasikan berdasarkan:

1. Aspek Kualitatif (SAP, 2010): relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman.

2. Aspek Kuantitatif (Mardiasmo, 2018): ketepatan waktu penyampaian, kecukupan pengungkapan, dan konsistensi penyajian.

#### **2.2.3.4 Komponen Kualitas Laporan Keuangan**

Komponen yang menentukan kualitas laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

#### **2.2.3.5 Manfaat Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Mulyadi (2016), manfaat laporan keuangan yang berkualitas adalah:

1. Sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, politik, dan sosial.
2. Sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap publik.
3. Sebagai sarana evaluasi kinerja pemerintah daerah.
4. Sebagai media transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD.

#### **2.2.3.6 Indikator Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan SAP (2010) serta penelitian Prasetyo (2023), indikator kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari lima aspek:

1. Relevansi  
Informasi keuangan harus bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan, memiliki nilai prediktif, serta menyediakan umpan balik.
2. Keandalan (Reliability)  
Informasi bebas dari kesalahan material, dapat diverifikasi, dan disajikan dengan jujur.

3. Dapat dibandingkan (Comparability)

Laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode dan antar entitas, sehingga pengguna dapat menganalisis tren keuangan.

4. Dapat dipahami (Understandability)

Informasi disajikan dalam format yang jelas dan mudah dimengerti oleh pengguna laporan, baik yang ahli maupun awam.

5. Ketepatan waktu (Timeliness)

Laporan disampaikan sesuai jadwal yang ditentukan. Keterlambatan penyampaian laporan menurunkan relevansi informasi.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi empiris untuk mendukung penelitian ini serta untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap) yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

Penelitian terdahulu disusun untuk menunjukkan posisi penelitian ini secara empiris serta memastikan kesinambungan antara variabel, indikator, dan instrumen kuesioner yang digunakan. Seluruh penelitian terdahulu yang dirujuk memiliki keterkaitan langsung dengan variabel Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan Kualitas Laporan Keuangan, sehingga mendukung perumusan kerangka pemikiran dan penyusunan item kuesioner penelitian. Berikut ini disajikan beberapa rangkuman mengenai penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Katili et al. (2025)  Judul: Pengaruh Penerapan SIPD dan SPI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Studi Kasus: OPD Provinsi Gorontalo	<b>Variabel</b> <b>Independen:</b> SIPD, SPI  <b>Variabel Dependen:</b> Kualitas Laporan Keuangan	SIPD dan SPI berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2	Florencia & Saleh (2023)  Judul: Pengaruh SIPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Studi Kasus: Pemkot Cimahi	<b>Variabel</b> <b>Independen:</b> SIPD  <b>Variabel Dependen:</b> Kualitas Laporan Keuangan	Hasil Penelitian Menunjukkan SIPD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
3	Wulandari & Yuliati (2023)  Judul: Pengaruh SIPD dan SPI	<b>Variabel</b> <b>Independen:</b> SIPD, SPI	Hasil Penelitian Menunjukkan SIPD dan SPI berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>terhadap Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>Studi Kasus: Pemkab Jember</p>	<p><b>Variabel Dependen:</b></p> <p>Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>laporan keuangan.</p>
4	<p>Kania (2025)</p> <p>Judul: Pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan SPI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Studi kasus: Pemkot Bandar Lampung</p>	<p><b>Variabel Independen:</b> SIPD, SPI</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>Hasil Penelitian Menunjukkan Sistem informasi Pemerintahan Daerah tidak berpengaruh signifikan, SPI berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
5	<p>Beli (2024)</p> <p>Judul: Pengaruh SIPD dan SPI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Studi Kasus: Pemkab Alor</p>	<p><b>Variabel Independen:</b> SIPD, SPI</p> <p><b>Variabel Dependen:</b> Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan SIPD dan SPI berpengaruh signifikan baik parsial maupun simultan dengan kontribusi 65,7%.</p>

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
6	Anjani et al. (2024)  Judul: Pengaruh SIPD dan SPI terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Studi Kasus: Kabupaten Bandung	<b>Variabel Independen:</b> SIPD, SPI  <b>Variabel Dependen:</b> Kualitas Laporan Keuangan	Hasil Penelitian Menunjukkan SIPD berpengaruh signifikan, SPI tidak berpengaruh signifikan.
7	Faizah & Amanah (2024)  Judul: Pengaruh SIPD dan SPI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  Studi Kasus: Pemkab Malang	<b>Variabel Independen:</b> SIPD, SPI  <b>Variabel Dependen:</b> Kualitas Laporan keuangan	Hasil Penelitian Menunjukkan SIPD berpengaruh signifikan, SPI tidak berpengaruh signifikan. Faktor monitoring internal menjadi kelemahan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun demikian, terdapat perbedaan hasil penelitian, dimana beberapa penelitian menemukan bahwa SIPD tidak berpengaruh signifikan, sedangkan SPI lebih dominan dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, khususnya pada konteks kecamatan di

Kabupaten Indramayu.

## **2.4 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan gambaran konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian. Kerangka ini disusun berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu sehingga dapat menjelaskan alur logika penelitian secara sistematis.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Penerapan SIPD yang optimal memungkinkan proses pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan secara terintegrasi sehingga meningkatkan akurasi, transparansi, dan ketepatan waktu laporan keuangan.

Di sisi lain, Sistem Pengendalian Internal (SPI) berperan dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai prosedur serta mampu meminimalisir kesalahan dan kecurangan.

Dengan demikian, semakin baik penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI), maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

### **2.4.1 Pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hubungan antara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan melalui peran sistem informasi dalam meningkatkan kualitas data keuangan.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola data perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan daerah secara terintegrasi. Penerapan SIPD bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan

keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, proses pencatatan dan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan meminimalkan kesalahan dalam pengolahan data keuangan.

Penerapan SIPD yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena sistem ini mampu menghasilkan data yang lebih akurat, transparan, serta mempermudah proses pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Florencia dan Saleh (2023) menunjukkan bahwa penerapan SIPD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi yang baik dapat membantu meningkatkan keakuratan dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Katili, Blongkod, dan Pakaya (2025) juga menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem informasi yang terintegrasi mampu meningkatkan transparansi serta mempermudah proses pengelolaan data keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, semakin baik penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

#### **2.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hubungan antara Sistem Pengendalian Internal (SPI) dengan kualitas laporan keuangan berkaitan erat dengan fungsi pengawasan dalam organisasi.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai tercapainya

tujuan organisasi, termasuk dalam hal keandalan laporan keuangan. Dalam sektor pemerintahan, penerapan sistem pengendalian internal sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi, termasuk keandalan laporan keuangan dan pengamanan aset negara.

Sistem pengendalian internal yang baik dapat membantu mencegah kesalahan pencatatan, meningkatkan akurasi data keuangan, serta memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penerapan SPI yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Katili, Blongkod, dan Pakaya (2025) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

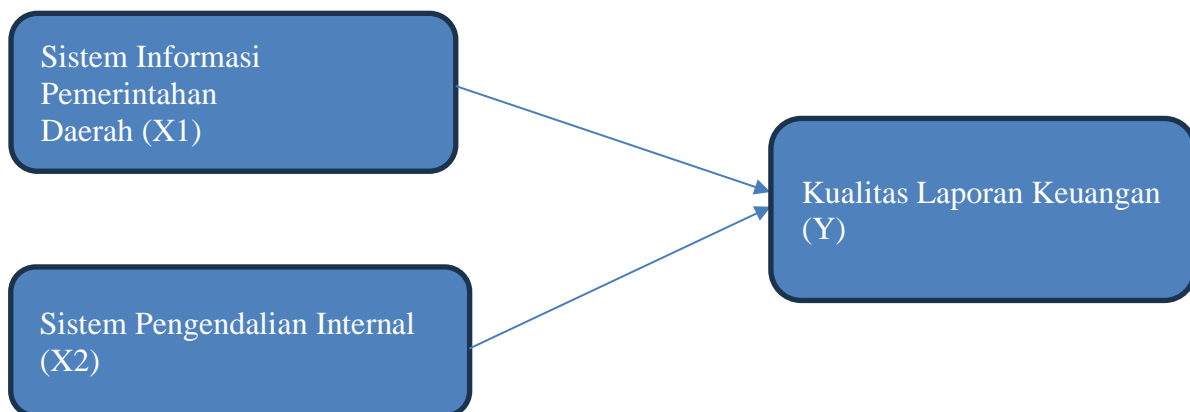
Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Yuliati (2023) juga menemukan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal yang baik mampu meningkatkan keandalan dan akurasi laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, semakin baik penerapan sistem pengendalian internal maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

## **2.5 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan representasi visual dari hubungan

antarvariabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI), sedangkan variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## 2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara mengenai hubungan antar variabel yang akan diuji secara empiris dalam penelitian ini.

Hipotesis penelitian disusun berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, namun pengujiannya tetap bergantung pada kondisi empiris di lapangan yang dapat menghasilkan temuan yang berbeda. Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- H1 : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
- H2 : Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.